

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral antara pria dan wanita sehingga menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan maka secara otomatis timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Namun dalam perjalanannya suatu perkawinan dapat putus karena perceraian. Setelah putusnya perkawinan tidak semata-mata hilang kewajiban suami kepada isteri terutama mengenai nafkah. Terhadap nafkah isteri yang tidak dipenuhi selama perkawinan oleh suami, pihak isteri dapat mengajukan gugatan nafkah terutang/ nafkah madliyah ke Pengadilan pada domisili tergugat.

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tuntutan nafkah terutang yang dapat dilakukan oleh isteri melalui gugat balik/ rekonvensi dalam perkara cerai talak dan melalui gugatan nafkah terutang secara tersendiri sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pemberian nafkah oleh suami dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penggugat/isteri dalam pengajuan gugatan terhadap nafkah terutang, sehingga dapat dicari solusi permasalahannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Empiris adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung, ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif.

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Semarang dapat diperoleh kesimpulan bahwa seorang Isteri dapat mengajukan gugatan nafkah terutang terhadap suami melalui dua cara yaitu melalui rekonvensi/ gugat balik dalam perkara cerai talak dan melalui pengajuan gugatan nafkah terutang tersendiri di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya tuntutan nafkah terutang yang dilakukan oleh isteri di Pengadilan mengalami kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya adalah suami dalam keadaan tidak mampu atau miskin, pihak isteri yang mengajukan gugatan nafkah terutang tidak datang ke pengadilan, suami tidak mempunyai kepentingan atau melakukan keberatan dan Besarnya Jumlah nafkah terutang yang diajukan isteri tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses berperkara.

Kata kunci: perkawinan, perceraian, nafkah terutang.

Abstract

Marriage is a sacred bond born inner between man and woman to become husband and wife with the aim to form a happy family and remain upon the divinity of the one true God. With the bond of marriage is then automatically arise rights and obligations between husband and wife. But in a marriage may be breaking up due to divorce. After the breakdown of a marriage is not solely the obligation of the husband of a missing wife especially about a living. Towards a living wife not filled during the marriage by the husband, the wife can file a lawsuit a living payable/a living madliyah to the Court at the domicile of defendants.

As for the goal that will be achieved with the existence of this research is to know the implementation of the demands of living payable can be done by the wife through turning on/rekonvensi in the case for divorce divorce lawsuit and through a living individually owed as a result of the fulfillment of the obligation of not granting a living by her husband and to know the constraints faced by the plaintiff/wife in filing a lawsuit against a living payable, so as to look for a solution of the problem.

Research methods used in this research is the empirical juridical legal approach that is research based on legal norms and also see reality-a reality that is happening in society. This research uses descriptive specifications analitis, method of data collection is done by conducting interviews with the speakers who came from a religious court of Semarang City Officials competent in obtaining data that will be used. Data that has been retrieved is then systematically arranged systematically and later served in the form of analysis.

From the results of the research writer in the Court of Semarang Religion can be obtained the conclusion that a wife can file a lawsuit against the husband owed her living through two ways, namely through rekonvensi/Jolt back in the case for divorce divorce and through filing a lawsuit in court individually owed a living. In corporate governance demands a living payable made by wife in court experience constraints encountered, including the husband in the State is not capable or poor, the wife filed a lawsuit a living payable does not come to court, the husband does not have the interest or make objections and the large amount of income payable asked his wife not to correspond to the costs incurred in the process of litigants.

Keywords: marriage, divorce, living payable.